

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :
SELLY KURNIASARI
NIM : 2015210515

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

**PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :
SELLY KURNIASARI
NIM : 2015210515

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Selly Kurniasari
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 04 September 1996
N.I.M : 2015210515
Program Studi : Manajemen
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
J u d u l : Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja
Perusahaan dengan Kepemilikan Publik sebagai
Variabel Moderasi

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 18 Maret 2019



(Dr. Muazaroh, S.E., M.T.)

Ketua Program Studi Sarjana Manajemen
Tanggal : 25 Maret 2019



(Burhanudin, SE., M.Si., Ph.D.)

THE EFFECT OF POLITICAL CONNECTION ON FIRM PERFORMANCE WITH PUBLIC OWNERSHIP AS A MODERATION VARIABLE

Selly Kurniasari

STIE Perbanas Surabaya

Email : sellykurniaaaa@gmail.com

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

Muazaroh

STIE PERBANAS SURABAYA

Email : muaz@perbanas.ac.id

Jl Nginden Semolo 34-36

ABSTRACT

Political connections is not something that every company has as one of their intangible resources which give them special connection to the government. The presence of political connection can usually be detected by the top officer or the largest shareholders of the company who also have positions in the government. The political connection can bring both benefits and risks to the company. The purpose of this research is to determine the effect of political connection to the company performance with public ownership as a moderation variable. The sample of this research was non-financial companies which listed in Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2017 that consisted 18 with political connections and 18 companies without it, which made it 36 companies in total. ROA is used to measure the firm performance. This research used company size and leverage as the control variables. This research used purposive sampling and multiple regression analysis technique. This research concluded that the political connections has no significant effects to the firm performance, therefore there was no way to proceed to the moderation test since the result of the previous hypothesis was not significant.

Keyword: *Political Connection, Public Ownership, Firm Performance*

PENDAHULUAN

Keberhasilan perusahaan tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan baik internal maupun eksternal, termasuk pengaruh lingkungan politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. (website resmi Wikipedia Indonesia, diakses pada 19 April 2018). Ikatan politis didasari karena adanya kesadaran pelaku bisnis bahwa elite politik memiliki kewenangan terhadap perumusan

kebijakan yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Keterkaitan politik dan bisnis seperti hubungan timbal balik, dimana peran politik dalam perumusan berbagai kebijakan yang dapat mendorong keberhasilan bisnis tetapi pelaku bisnis harus bersedia membantu partai politik dalam hal pendanaan sebagai konsekuensinya. Faccio (2006) menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan memiliki koneksi apabila setidaknya satu dari pemegang saham terbesar perusahaan (yaitu siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung

mengendalikan 10% suara) atau jajaran direksi adalah seorang anggota parlemen, seorang menteri, atau seorang kepala negara, atau merupakan seseorang yang memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu pimpinan perusahaan, pemegang mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai berkuasa. Menurut Faccio (2006) praktik *political connection* lebih umum terjadi pada perusahaan yang tingkat korupsi negaranya lebih tinggi. Tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) pada tahun 2015 yang dirilis oleh Lembaga *Transparency International* (TI) dimana Indonesia menempati peringkat ke-88 dari total pengamatan terhadap 168 negara dengan total skor CPI 36 dari total nilai 100. Sedangkan, pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 108 negara dengan total skor CPI 37 dari total nilai 100. Semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi (website resmi *Transparency International*, diakses pada 20 April 2018). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif dalam *tax planning* yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah. (Butje dan Tjondro, 2014).

Jika perusahaan telah *go public*, maka masyarakat umum berhak menjadi pemilik saham. Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat (Aprillia, 2013). Kepemilikan saham perusahaan oleh publik menandakan bahwa adanya transparansi dimana masyarakat dapat

melihat dan memiliki hak untuk mengontrol kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Kepemilikan publik bisa bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Adanya *monitoring* dan pengawasan dari berbagai pihak yang ketat, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan dan menjalankan kegiatan operasinya. Jika perusahaan telah *go public*, maka masyarakat umum berhak menjadi pemilik saham. Kepemilikan publik merupakan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat (Aprillia, 2013). Kepemilikan saham perusahaan oleh publik menandakan bahwa adanya transparansi dimana masyarakat dapat melihat dan memiliki hak untuk mengontrol kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Kepemilikan publik bisa bersifat memperkuat atau memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Adanya *monitoring* dan pengawasan dari berbagai pihak yang ketat, perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan perumusan kebijakan dan menjalankan kegiatan operasinya.

Hasil penelitian Eforis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap kinerja BUMN. Hal itu didukung juga oleh penelitian Purba (2004) yang menunjukkan bahwa jika proporsi saham publik lebih dari 40% maka kinerja perusahaan akan tinggi. Proporsi saham yang besar akan memotivasi adanya pengawasan ketat dan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.

Jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka kepemilikan publik akan memperkuat pengaruh tersebut karena perusahaan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya dengan adanya pengawasan publik yang ketat. Jika koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, pengaruh itu akan bisa dikurangi dengan

kepemilikan publik. Kepemilikan publik akan memperlemah pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan *monitoring* masyarakat mampu memotivasi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya yang buruk.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kinerja Perusahaan

Menurut Jumingan (2006:239), kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Resources-based View

Teori *resources-based view* (RBV) adalah teori dalam manajemen strategis yang menjabarkan mengapa dalam industri yang sama ada perusahaan yang sukses dan tidak sukses. Tujuan dari teori RBV adalah mencapai *competitive advantage*, ketika perusahaan memiliki keunggulan yang tidak dimiliki perusahaan lain. Jauch dan Glueck (1989) menyatakan bahwa suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing jika memenuhi ciri-ciri antara lain 1) Kompetensi khusus, misalnya memiliki produk dengan mutu lebih baik, saluran distribusi lebih lancar, penyerahan produk lebih cepat, memiliki merek produk lebih terkenal. 2) Menciptakan persaingan tidak sempurna. 3) Keberlanjutan, artinya keunggulan bersaing harus bisa berlanjut dan tidak terputus-putus. 4) Cocok dengan lingkungan eksternal. 5) Laba yang diperoleh lebih tinggi daripada rata-rata perusahaan lain. *Firm resources* terdiri dari dua macam, yaitu *tangible resources* yang terdiri dari sumber daya berwujud dan umumnya masuk dalam pembukuan perusahaan, seperti pabrik, tanah, kendaraan, bahan baku, serta mesin.

Intangible resources terdiri dari sumber daya yang tidak berwujud dan sedikit sulit untuk masuk dalam pembukuan perusahaan, antara lain seperti keahlian karyawan, budaya perusahaan, struktur organisasi, persepsi seluruh anggota organisasi dan proses yang terjadi dalam organisasi.

Koneksi Politik

Political connection dapat dipandang sebagai sebuah situasi dimana setidaknya satu dari *top officer* sebuah perusahaan, pemegang saham besar perusahaan, atau kerabat mereka adalah pemegang jabatan politik tinggi atau seorang politikus yang menonjol (Faccio, 2006). Perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya akses mudah untuk pembiayaan pinjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar dan menerima kontrak pemerintah (Wijantini, 2007). Dieleman dan Sachs (2008) mengungkapkan bahwa kedekatan ikatan politis dengan rezim Soeharto merupakan faktor terpenting kesuksesan sebuah perusahaan karena akses yang lebih luas terhadap sumber daya-sumber daya yang dikuasai negara.

Kepemilikan Publik

Struktur kepemilikan akan mempengaruhi perilaku dan performansi perusahaan (Navissi dan Naiker, 2006). Kepemilikan saham perusahaan oleh publik menandakan bahwa adanya transparansi dimana masyarakat dapat melihat dan memiliki hak untuk mengontrol kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Sehingga, jika publik ikut memiliki saham perusahaan, maka dengan kontrol ketat masyarakat, perusahaan akan lebih termotivasi meningkatkan kinerjanya karena nantinya akan dipantau masyarakat sebagai bentuk transparansi. Selain itu, kepemilikan publik juga menandakan bahwa

perusahaan tidak dikelola ataupun dikuasai oleh kalangan tertentu saja.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan

Menurut hasil penelitian Su dan Fung (2013) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

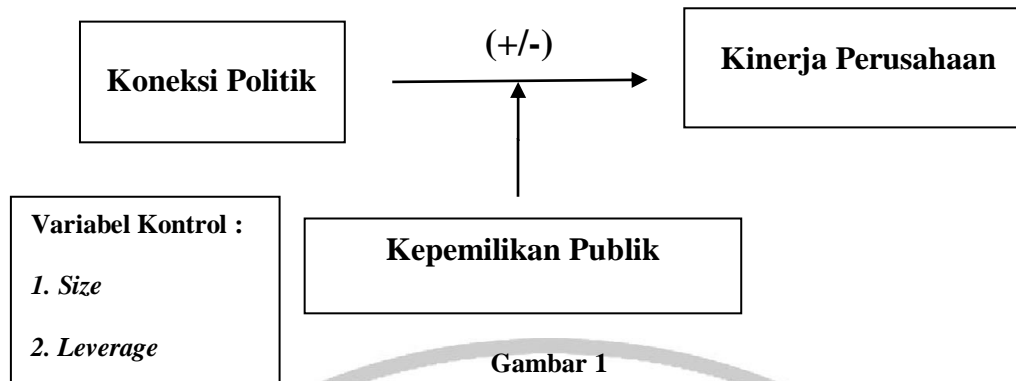
Sheng, Zhou, dan Li (2011) mengatakan bahwa ikatan politis membantu perusahaan mendapatkan sumber daya-sumber daya yang terkait dengan peraturan. Wijantini (2007) menyatakan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik ditemukan menikmati beberapa keuntungan diantaranya yaitu akses mudah untuk pembiayaan pinjaman bank, keringanan pajak, kekuatan pasar, dan menerima kontrak pemerintah. Adanya akses kemudahan memperoleh pinjaman yang tinggi akan membuat beban hutang perusahaan juga semakin tinggi. Soebiantoro (2007) menjelaskan bahwa jumlah hutang yang semakin meningkat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Sehingga menurut hasil penelitian Wulandari dan Raharja (2013) koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan terhadap kinerja perusahaan (ROA) dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Hal itu didukung oleh Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) bahwa koneksi politik juga berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan di Pakistan terutama selama rezim otokratis.

H1 : Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan

Moderasi Kepemilikan Publik dalam Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan

Purba (2004) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemilikan saham publik dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Jika proporsi saham publik lebih dari 40%, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Memperbesar kepemilikan saham oleh publik bisa mendorong pihak manajemen perusahaan untuk lebih transparan dan lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Hal itu juga didukung penelitian lain yaitu Gitundu, et al (2016) bahwa kepemilikan individu mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA), hal ini membuktikan bahwa perusahaan sangat mengharapkan adanya investasi yang memadai dari investor individual (publik) sehingga bisa menambah modalnya dalam menunjang kinerja perusahaannya mengingat bahwa kepemilikan publik merupakan sumber pendanaan eksternal perusahaan yang diperoleh dari pernyataan saham oleh masyarakat.

Jika koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, maka kepemilikan publik akan memperkuat pengaruh tersebut karena perusahaan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya dengan adanya pengawasan publik yang ketat. Jika koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, pengaruh itu akan bisa dikurangi dengan kepemilikan publik.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran Peneliti

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Koneksi Politik berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan
- H2 : Kepemilikan publik memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini masuk ke dalam penelitian murni, dimana peneliti ingin mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya yakni terkait dengan koneksi politik, kepemilikan publik, dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan tingkatannya, penelitian ini termasuk golongan studi pengujian hipotesis. Karena peneliti ingin menjelaskan hal yang sudah diketahui hipotesisnya dan menjabarkan hasil pengujian hipotesis tersebut. Dalam hal ini, hipotesis mengenai adanya pengaruh koneksi politik dan kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder melalui proses-proses pemantauan, yakni pemantauan pada laporan keuangan tahunan untuk memperoleh data keuangan perusahaan go

public dan struktur kepemilikan yang diperoleh melalui website BEI (Bursa Efek Indonesia).

Berdasarkan pengendalian variabel oleh peneliti, penelitian ini termasuk *ex post facto* karena variabel koneksi politik, kinerja perusahaan, dan kepemilikan publik merupakan hal-hal historis yang sudah terjadi sehingga bisa diperoleh datanya melalui website BEI (Bursa Efek Indonesia) sehingga dikatakan bisa dikendalikan oleh peneliti.

Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan studi panel yakni gabungan dari *cross-sectional* dan *time series*. Dimana penelitian ini menggunakan data beberapa perusahaan dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu yakni 2014-2017.

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, variabel moderasi, dan variabel control. Adapun identifikasi variabelnya adalah sebagai berikut :

Variabel Dependen = Kinerja Perusahaan (ROA)

Variabel Independen = Koneksi Politik

Variabel Moderasi = Kepemilikan Publik

Variabel Kontrol = Ukuran Perusahaan (*Size*) dan *Leverage*

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan segala bidang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2017. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terkoneksi politik dan tidak terkoneksi politik pada periode 2014-2017 yang termasuk dalam kriteria, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Perusahaan non keuangan. (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah. (3) Perusahaan yang terkoneksi politik, dengan kriteria sebagai berikut (a) Direksi atau anggota dewan komisaris memangku jabatan sebagai anggota MPR periode 2014-2019, atau (b) Direksi atau anggota dewan komisaris memangku jabatan sebagai anggota kabinet dan menteri pada pemerintahan Bapak Joko Widodo periode 2014-2019, atau (c) Para pemegang saham minimal 5% memangku jabatan sebagai anggota MPR/menteri, atau (d) Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. (4) Perusahaan yang tidak terkoneksi politik, dengan kriteria sebagai berikut (a) Direksi atau anggota dewan komisaris tidak memangku jabatan sebagai anggota MPR periode 2014-2019, atau (b) Direksi atau anggota dewan komisaris tidak memangku jabatan sebagai anggota kabinet dan menteri pada pemerintahan Bapak Joko Widodo periode 2014-2019, atau (c) Para pemegang saham minimal 5% tidak memangku jabatan sebagai anggota MPR/menteri, atau (d) Perusahaan yang bergerak di industri yang sama dengan perusahaan terkoneksi politik dan memiliki total aset yang mendekati perusahaan terkoneksi politik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dan alat uji statistik menggunakan SPSS.

Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai berikut :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$
$$Y_2 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 * P + \beta_3 X_1 * P + B_4 X_2 + B_5 X_3 + e_i$$

Keterangan :

Y_i	= Kinerja Perusahaan
α	= Koefisien konstanta
β_i	= Koefisien regresi yang diuji (dimana $i = 1,2,3,4,5,6,7,8$)
X_1	= Koneksi Politik
X_2	= Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)
X_3	= <i>Leverage</i> (Variabel Kontrol)
P	= Kepemilikan Publik
e_i	= Error

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 36 sampel perusahaan yang terdiri dari 18 perusahaan terkoneksi politik dan 18 perusahaan yang tidak terkoneksi politik. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil pengujian dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Analisis deskriptif didalamnya menjelaskan mengenai semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan dari hasil

deskriptif masing-masing variabel pada penelitian ini :

Kinerja Perusahaan (ROA)

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan salah satu rasio profitabilitas yaitu *return on assets* (ROA). Seperti yang telah dijelaskan pada

bab selanjutnya bahwa rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah aset yang digunakan. Berikut adalah hasil analisis deskriptif ROA dari perusahaan yang terkoneksi politik dan perusahaan yang tidak terkoneksi politik :

Tabel 1
DESKRIPSI VARIABEL KINERJA PERUSAHAAN

Kinerja Perusahaan	Terkoneksi (%)	Tidak Terkoneksi (%)
Minimum	-18,04	-4,93
Maksimum	20,68	20,43
Rata-rata (Mean)	4,11	5,61
Std Deviasi	6,77	5,86

Sumber : Data diolah

Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai minimum variabel ROA perusahaan terkoneksi politik sebesar -18,04% adalah ROA milik PT. Garuda Indonesia Airlines (GIAA) pada tahun 2017. Penurunan kinerja perusahaan ini disebabkan banyak hal, seperti membengkaknya biaya bahan bakar, pengeluaran biaya *extra ordinary*, serta fluktuasi jumlah penumpang. Pembengkakan biaya bahan bakar yang terjadi tahun 2017 mengalami kenaikan 25% dari US\$ 924 juta menjadi US\$ 1,15 miliar. Selain itu, pengeluaran biaya *extra ordinary* yang dimaksud terdiri dari pembayaran pengampunan pajak (*tax amnesty*) mencapai US\$ 137 juta atau Rp 1,84 triliun dan denda hukum internasional dari otoritas Australia terkait persaingan usaha kargo dengan nilai mencapai US\$ 8 juta atau Rp 108 miliar. Adanya fluktuasi jumlah penumpang yang dipengaruhi aktivitas Gunung Agung menyebabkan penurunan jumlah penumpang internasional sebesar 1-1,5 juta dalam satu hari ([Website Detik Finance](#), diakses pada 05 Januari 2019).

Nilai maksimum variabel ROA perusahaan terkoneksi politik sebesar 20,68% adalah ROA milik PT. Bukit

Asam (PTBA) pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan harga jual rata-rata batu bara meningkat naik sebesar 15% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sehingga laba bersih ikut melonjak dan kinerja perusahaan meningkat. Selain dipengaruhi harga jual batu bara yang naik, peningkatan kinerja juga dipengaruhi pertumbuhan volume produksi, angkutan dan penjualan serta efisiensi yang dilakukan ([Website Resmi Katadata News](#), diakses pada 05 Januari 2019).

Berdasarkan tabel 4.3 nilai minimum variabel ROA perusahaan tidak terkoneksi politik adalah -4,93% adalah ROA milik PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) pada tahun 2015. Hal itu disebabkan ELTY terbelit utang besar salah satunya adalah obligasi konversi sebesar US\$ 155 juta yang jatuh tempo pada 23 Maret 2015. Beberapa entitas anak perusahaan ELTY pun mengalami akumulasi kerugian bersih dan defisiensi modal ([Website Resmi Kontan](#), diakses pada 05 Januari 2019). Nilai maksimum variabel ROA perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 20,43% yang merupakan ROA milik PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) pada tahun 2017. Angka tersebut bisa dicapai karena adanya peningkatan pendapatan pada divisi pertambangan batu bara. Harga batu bara meningkat secara tahunan dan

penjualan ikut meningkat sehingga laba bersih melonjak naik (Website Resmi Market Bisnis, diakses pada 05 Januari 2019).

Nilai mean ROA perusahaan terkoneksi adalah 4,11% dan standar deviasi 6,77%. Hal ini berarti bahwa nilai mean perusahaan terkoneksi politik lebih kecil dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data ROA perusahaan terkoneksi politik yang tidak merata. Nilai mean perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 5,61% dan standar deviasi 5,86%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean perusahaan tidak terkoneksi politik lebih kecil dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data ROA perusahaan tidak terkoneksi politik yang tidak merata. Nilai mean ROA perusahaan terkoneksi politik sebesar

4,11% lebih kecil dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik yang sebesar 5,61%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan terkoneksi politik yang diukur dengan ROA lebih rendah dibanding kinerja perusahaan tidak terkoneksi politik.

Kepemilikan Publik

Berdasarkan tabel 2 nilai minimum variabel kepemilikan publik perusahaan terkoneksi politik adalah 2,35% yang merupakan proporsi kepemilikan publik milik PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) pada tahun 2017. Nilai maksimum variabel kepemilikan publik perusahaan terkoneksi politik adalah 75,23% yang merupakan proporsi kepemilikan publik milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada tahun 2014.

Tabel 2
DESKRIPSI VARIABEL KEPEMILIKAN PUBLIK

Kepemilikan Publik	Terkoneksi (%)	Tidak Terkoneksi (%)
Minimum	2,35	3,00
Maksimum	75,23	99,86
Rata-rata (Mean)	30,56	40,66
Std Deviasi	15,63	23,48

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 nilai minimum variabel kepemilikan publik tidak terkoneksi politik adalah 3% yang merupakan proporsi kepemilikan publik milik PT Golden Energy Mines (GEMS) berturut-turut pada tahun 2014-2017. Nilai maksimum variabel kepemilikan publik perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 99,86% yang merupakan proporsi kepemilikan milik PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) pada tahun 2017.

Nilai mean kepemilikan publik perusahaan terkoneksi adalah 30,56% dan standar deviasi 15,63%. Hal ini berarti bahwa nilai mean kepemilikan publik perusahaan terkoneksi politik lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data kepemilikan publik perusahaan terkoneksi

politik yang cukup baik. Nilai mean kepemilikan publik perusahaan tidak terkoneksi adalah 40,66% dan standar deviasi adalah 23,48%. Hal ini berarti bahwa nilai mean kepemilikan publik perusahaan tidak terkoneksi politik lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data kepemilikan publik perusahaan tidak terkoneksi politik yang cukup baik.

Nilai mean kepemilikan publik perusahaan terkoneksi politik sebesar 30,56% lebih kecil dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik yang sebesar 40,66%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik mengalokasikan proporsi kepemilikan untuk publik lebih kecil dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik.

Penelitian ini juga menggunakan 2 variabel kontrol yaitu *size* dan *leverage*. Berikut analisis deskriptif *size* dan *leverage* :

Ukuran Perusahaan (*SIZE*)

Tabel 3
DESKRIPSI VARIABEL *SIZE*

Size	Terkoneksi	Tidak Terkoneksi
Minimum	27,85	27,76
Maksimum	32,92	31,79
Rata-rata (Mean)	30,37	29,96
Standar Deviasi	1,34	1,04

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai minimum *size* perusahaan terkoneksi politik sebesar 27,85 atau sebesar Rp 1.248.343.000.000 yang dimiliki oleh PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa INAF memiliki nilai aset paling kecil dibanding perusahaan terkoneksi lainnya. Nilai maksimum *size* perusahaan terkoneksi politik sebesar 32,92 atau sebesar Rp 198.484.000.000.000 yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa TLKM memiliki nilai aset paling besar dibanding perusahaan terkoneksi lainnya.

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai minimum *size* perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 27,76 atau sebesar Rp1.140.160.000.000 yang dimiliki oleh PT Sigmagold Inti Perkasa (TMPI) pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa TMPI memiliki nilai aset paling kecil dibanding perusahaan terkoneksi lainnya. Nilai maksimum *size* perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 31,79 atau sebesar Rp 63.706.488.000.000 yang dimiliki oleh PT XL Axiata Tbk (EXCL) pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa EXCL memiliki nilai

aset paling besar dibanding perusahaan tidak terkoneksi lainnya.

Nilai mean *size* perusahaan terkoneksi adalah 30,37 dan standar deviasi 1,34. Hal ini berarti bahwa nilai mean *size* perusahaan terkoneksi politik lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data *size* perusahaan terkoneksi politik yang cukup baik. Nilai mean *size* perusahaan tidak terkoneksi adalah 29,96 dan standar deviasi adalah 1,04. Hal ini berarti bahwa nilai mean *size* perusahaan tidak terkoneksi politik lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data *size* perusahaan terkoneksi politik yang cukup baik.

Nilai mean *size* perusahaan terkoneksi politik sebesar 30,37 lebih besar dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik yang sebesar 29,96. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar yang diukur berdasarkan nilai total asetnya dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik.

Leverage

Tabel 4
DESKRIPSI VARIABEL *LEVERAGE*

<i>Leverage</i>	Terkoneksi (X)	Tidak Terkoneksi (X)
Minimum	0,07	0,07
Maksimum	0,84	0,93
Rata-rata (Mean)	0,54	0,45
Std Deviasi	0,16	0,23

Sumber : Data diolah

Penelitian ini menggunakan *leverage* sebagai variabel kontrol dimana *leverage* diukur dengan menggunakan DAR (*Debt To Asset Ratio*). Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai minimum *leverage* perusahaan terkoneksi politik sebesar 0,07 kali yang dimiliki oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR)

pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa SMBR memiliki jumlah hutang paling kecil dibanding perusahaan terkoneksi lainnya. Nilai maksimum *leverage* perusahaan terkoneksi politik sebesar 0,84 kali yang dimiliki oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa PTPP memiliki jumlah hutang paling besar dibanding perusahaan terkoneksi lainnya.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai minimum *leverage* perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 0,07 kali yang dimiliki oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul Tbk (SIDO) pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa SIDO memiliki jumlah hutang paling kecil dibanding perusahaan terkoneksi lainnya. Nilai maksimum *leverage* perusahaan tidak terkoneksi politik adalah 0,93 kali yang dimiliki oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa TBIG memiliki jumlah hutang paling besar

dibanding perusahaan tidak terkoneksi lainnya.

Nilai mean *leverage* perusahaan terkoneksi adalah 0,54 kali dan standar deviasi 0,16 kali. Hal ini berarti bahwa nilai mean *leverage* perusahaan terkoneksi politik lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data *leverage* perusahaan terkoneksi politik yang cukup baik. Nilai mean *leverage* perusahaan tidak terkoneksi adalah 0,45 kali dan standar deviasi adalah 0,23 kali. Hal ini berarti bahwa nilai mean *leverage* perusahaan tidak terkoneksi politik lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga mengindikasikan penyebaran data *leverage* perusahaan terkoneksi politik yang cukup baik.

Nilai mean *leverage* perusahaan terkoneksi politik sebesar 0,54 kali lebih besar dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik yang sebesar 0,45 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki jumlah hutang yang lebih besar dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik.

Tabel 5
HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-27,51	12,04		-2,28	0,02
K_POL	-0,54	0,95	-0,04	-0,57	0,57
SIZE	1,36	0,41	0,26	3,28	0,00
LEVERAGE	-16,48	2,46	-0,53	-6,70	0,00
Model F Hitung					16,19
Sig F					0,00
R Square					0,26

Sumber : Data diolah

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan (ROA)

Koneksi politik merupakan ikatan politis antara perusahaan dan pemerintah. Koneksi politik memberikan dampak dan keuntungan bagi perusahaan antara lain kemudahan memperoleh akses pinjaman, kemudahan menerima proyek

pemerintah, serta mendapat kekuatan pasar. Keunggulan-keunggulan tersebut hanya bisa dimiliki beberapa perusahaan tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Indikasi adanya ikatan politis bisa ditandai dengan adanya pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 5% ataupun salah satu dewan direksi di perusahaan tersebut merupakan anggota parlemen atau menteri (termasuk

menteri yang pernah di *reshuffle* kabinet), selain itu juga perusahaan-perusahaan BUMN *go public* karena secara hukum BUMN dimiliki pemerintah sehingga ada ikatan politis antara BUMN dan pemerintah.

Berdasarkan hasil uji t dari variabel kinerja perusahaan yang dihitung dengan menggunakan ROA, diperoleh t hitung dari koneksi politik -0,57 kurang dari t tabel 1,96 dengan tingkat signifikan 0,57 yang lebih dari 0,05 artinya variabel koneksi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Hal itu sangat mungkin terjadi karena perusahaan mengalami tekanan keuangan dikarenakan kemudahan memperoleh pinjaman sehingga perusahaan semakin terbebani dengan jumlah hutang yang semakin banyak dan bisa menyebabkan terjadinya *financial distress*. Kemudahan memperoleh pinjaman jika dikelola dan dialokasikan untuk pengeluaran produktif seperti ekspansi dan pembelian alat produksi maka bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Jika pengelolaan hutang tidak baik maka justru bisa menjadi beban perusahaan karena hutang semakin menumpuk dengan adanya akses mudah memperoleh pinjaman. Jika *financial distress* tidak bisa ditangani oleh manajemen perusahaan bisa menyebabkan penurunan kinerja dan kebangkrutan.

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan negatif namun tidak signifikan, artinya perusahaan yang terkoneksi politik memiliki ROA yang lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Hal ini sejalan dengan penelitian penelitian Saeed, Belghitar, dan Clark (2016) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Wulandari dan Raharja (2013) juga menemukan bahwa perusahaan yang terkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah dibanding perusahaan tidak terkoneksi politik dilihat dari rasio ROA. Hal itu juga didukung

oleh penelitian Faccio (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan yang terhubung politis menunjukkan kinerja akuntansi yang lebih buruk daripada perusahaan yang tidak terhubung sehingga koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Hasil yang tidak signifikan bisa terjadi dikarenakan manajemen perusahaan tidak bisa memanfaatkan adanya koneksi politik sehingga tidak bisa mendapatkan peluang untuk meningkatkan profitabilitas dan mendongkrak kinerja. Hal ini menandakan bahwa kinerja perusahaan tidak semata-mata ditentukan oleh adanya koneksi politik tetapi juga terkait dengan bagaimana perusahaan bisa menerapkan strategi dan mengelola perusahaan tanpa menjadikan kemudahan akses pendanaan sebagai cara utama dalam memperoleh profitabilitas. Selain itu juga adanya kesadaran perusahaan akan beberapa resiko yang dihadapi jika memanfaatkan koneksi politik, salah satunya tingkat hutang yang cenderung akan meningkat dan resiko menurunnya kinerja. Penurunan kinerja akan berdampak pada hilangnya minat investor dalam berinvestasi ke perusahaan.

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh koneksi politik, namun terdapat *size* dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Perusahaan yang terkoneksi politik cenderung memiliki ukuran perusahaan yang lebih besar dibanding perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Perusahaan dengan Kepemilikan publik sebagai variabel moderasi

Dalam penelitian ini uji moderasi tidak bisa dilakukan karena hasil dari uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut : (1) Koneksi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. (2) Uji moderasi tidak bisa dilakukan karena koneksi politik berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu : (1) Terbatasnya perusahaan yang memiliki koneksi politik selama periode penelitian. (2) Kriteria koneksi politik dalam penelitian ini hanya diidentifikasi dari jabatan dewan direksi / komisaris / pemegang saham perusahaan yang menjabat sebagai anggota MPR atau menteri tanpa memperhatikan hubungan langsung seperti pertemanan dan keluarga dikarenakan sulit diidentifikasi. (3) Nilai koefisien determinasi yaitu R^2 hanya sebesar 0,26 yang artinya variabel independen penelitian memiliki nilai yang rendah dalam mempengaruhi variabel dependen penelitian.

Berdasarkan pada hasil dan ketentuan yang ada dalam penelitian ini maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu (1) Menambah periode penelitian. (2) Menambah variabel penelitian agar nilai koefisien determinasi yang mempengaruhi variabel dependen semakin besar. (3) Menambah pengukuran variabel koneksi politik.

Selain mengukur dari adanya direksi/komisaris/pemegang saham yang menjadi parlemen/menteri, juga bisa diukur dari jumlah sumbangan yang diberikan perusahaan kepada partai politik maupun ke calon presiden dan calon wakil presiden dalam ajang pemilu. Pengukuran variabel koneksi politik juga bisa diperluas dengan melihat hubungan antara perusahaan dengan kepala daerah,

politikus, ataupun anggota partai politik. Adapun saran untuk investor disarankan untuk lebih selektif menjadikan memilih perusahaan sebagai pertimbangan keputusan berinvestasi karena perusahaan yang terkoneksi politik cenderung memiliki kinerja yang tidak lebih baik dari perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprillia, E., 2013. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi auditor switching. *Accounting Analysis Journal*, 1(4), pp. 199-207.
- Butje, S. dan Tjondro, E. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), pp. 1-9.
- Dieleman, M. and Sachs, W.M., 2008. Coevolution of institutions and corporations in emerging economies: How the Salim group morphed into an institution of Suharto's crony regime. *Journal of Management Studies*, 45(7), pp.1274-1300.
- Eforis, Chermian. 2017. Pengaruh Kepemilikan Negara Dan Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Keuangan Bumn (Studi Pada Perusahaan Bumn Yang Go Public Pada Tahun 2012 – 2015). *Jurnal Ultima Accounting*, 9(1), pp. 18-31.
- Faccio, Mara. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96(1), pp. 369-386.
- Faccio, Mara. 2010. Differences between Politically Connected and Nonconnected Firms: A Cross-Country Analysis. *Financial Management*, 39(3), pp. 905-927.
- Gitundu, et al. 2016. The influence of ownership structure on financial performance of privatized companies in Kenya. *African Journal of Business Management*, 10(4), pp.75-88.

- Jauch Lawrence, R. and Glueck William, F. 1989. *Manajemen Dan Strategis Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Cetakan Pertama, PT. Bumi Aksara.
- Navissi, F. and Naiker, V., 2006. Institutional ownership and corporate value. *Managerial Finance*, 32(3), pp.247-256.
- Purba, Jan Horas V. 2004. Pengaruh Proporsi Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 4(2), pp. 109-116.
- Saeed, A., Belghitar, Y. and Clark, E., 2016. Do political connections affect firm performance? evidence from a developing country. *Emerging Markets Finance and Trade*, 52(8), pp.1876-1891.
- Sheng, S., Zhou, K.Z. and Li, J.J. 2011. The effects of business and political ties on firm performance: Evidence from China. *Journal of Marketing*, 75(1), pp.1-15.
- Soebiantoro, U. 2007. Pengaruh struktur kepemilikan saham, leverage, faktor intern dan faktor ekstern terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1), pp.41-48.
- Su, Zhong-Qinand Fung, Hung-ay. 2013. Political Connections and Firm Performance In Chinese Companies. *Pasific Economic Review*, 18(3), pp. 283-317.
- Wijantini, 2007. A Test The Relationship Between Political Connection And Indirect Cost of Financial Distress In Indonesia. *Asian Academy Of Management Journal Of Accounting & Finance*, 3(2), pp. 61-81.
- Wulandari, T. dan Raharja, R., 2013. Analisis Pengaruh Political Connection dan Struktur Kepemilikan terhadap Kinerja Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), pp.141-152.
- Website Resmi Detik Finance (<https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3887162/ini-yang-membuat-garuda-rugi-rp-288-t-di-2017>, diakses pada 05 Januari 2019).
- Website Resmi Katadata News (<https://katadata.co.id/berita/2017/10/19/harga-batu-bara-naik-laba-bersih-bukit-asam-melonjak-250>, diakses pada 05 Januari 2019).
- Website Resmi Kontan (<https://investasi.kontan.co.id/news/bakrieland-masih-terbelit-utang>, diakses pada 05 Januari 2019).
- Website Resmi Market Bisnis (<https://market.bisnis.com/read/20170302/192/633192/laba-bersih-golden-energy-mines-gems-melonjak-di-atas-16-kali-lipat>, diakses pada 05 Januari 2019).
- Website Resmi Transparency International (www.TI.or.id, diakses pada 20 April 2018).
- Website Resmi Wikipedia Indonesia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, diakses pada 19 April 2018).